

PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SIDOARJO GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL

Samuel Indrayana¹, Bagus Ananda Kurniawan², Tiara Regita Cahyani³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya

e-mail: indrayana@ubhara.ac.id¹, bagus@ubhara.ac.id², gitaare2701@gmail.com³

Abstrak

Salah satu hasil dari program pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo adalah pendampingan untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini merupakan bentuk layanan administrasi kependudukan. Salah satu hasil dari program ini adalah pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ini adalah salah satu upaya untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan membantu kepentingan masyarakat. Program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Identitas Kependudukan Digital. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo adalah tempat yang bagus untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pendampingan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan

Abstract

One of the outcomes of the dedication program to the student community carried out in Sidoarjo District Public Service Mall is the support for the activation of the Digital Identity of Population (ICD). The program is a form of administrative service of the population. One result of this program is the accompaniment of digital identity activation (IKD). It is one of the efforts to provide services that are faster and easier to realize good governance and help the interests of the public. The program also increases public awareness about the importance of Digital Identities.

Keywords: Adjoining, Digital Population Identity (ICD), Population Administration

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), Kementerian dalam negeri terus berusaha untuk memperluas cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melakukan aktivasi IKD, baik secara resmi di Dinas Dukcapil maupun melalui layanan jemput bola dengan mengunjungi masyarakat secara langsung. Pendekatan sosial berfungsi sebagai agen perubahan yang membantu memecahkan pelanggaran masyarakat. Pendampingan masyarakat dapat didefinisikan sebagai interaksi yang dinamis antara kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan. Misalnya, mereka membuat program untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, mobilisasi sumber daya masyarakat lokal, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses ke pemenuhan kebutuhan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan itu, prinsip pemberdayaan masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, peran pendamping masyarakat sering diwujudkan dalam pemecah masalah. Program tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan program.

Sehubungan dalam hal ini, pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak setiap warga yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Republik Indonesia.

Menurut Reddy Kusuma, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispensukcapil) Kabupaten Sidoarjo, jumlah IKD yang diaktifkan sejak awal tahun 2023 telah luar biasa, mencapai

82.657. Bahkan ruitn melakukan jemput bola untuk mempercepat pengaktifan IKD. Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang digunakan oleh penduduk Indonesia di ponsel, baik berupa foto maupun kode QR. Ini diharapkan dapat mempersingkat proses administrasi, menjadikannya lebih cepat, efisien, dan efektif.

Maka dari itu, di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo menerima semua kalangan mahasiswa dan siswa/siswi untuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan memberdayakan mahasiswa pengabdian kepada masyarakat untuk langsung terjun di lapangan sebagai Pendamping Administrasi Kependudukan untuk membantu Kabupaten Sidoarjo dalam menangani permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan dalam layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini meliputi menjalankan pendampingan adminduk hingga pengurusan kartu keluarga barcode dan IKD.

METODE

Metode yang digunakan dalam pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo adalah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat kota sidoarjo yang diarahkan di Mal Pelayanan Publik. Lokasi pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Jl. Veteran - Lingkar Timur No. 888 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Peran kegiatan pengabdian pendampingan ini pembimbing sebagai fasilitator dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memastikan mengenai apakah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan dan pembekalan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa mempersiapkan surat pakta integritas dengan pihak terkait serta mempersiapkan device untuk menginstal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 2) Tahap sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengabdian agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- 3) Tahap Proses data, manajemen, dan penginputan individu yang belum memiliki kartu keluarga berbarcode dan IKD yang akan didampingi untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital
- 4) Tahap pelaksanaan pelayanan dan pelaporan kepada warga yang sama sekali belum melakukan aktivasi IKD.
- 5) Pada tahap akhir program pengabdian pendampingan ini, instruksi langsung diberikan untuk menghapus akun di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menghindari penggunaan akun tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah KTP-el digital yang berisi informasi elektroik yang digunakan untuk merepresentasikan data balikan dan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital dengan menggunakan smartphone menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2022 Dalam pelaksanaan pendampingan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tetap melibatkan pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana. Terdapat beberapa syarat utama untuk memperoleh identitas kependudukan digital, seperti:

- a) Memiliki smartphone berbasis android
- b) Sudah memiliki KTP Elektronik fisik atau telah melakukan rekam data meskipun belum memiliki KTP Elektronik
- c) Memiliki alamat email

Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan manajemen kependudukan melalui teknologi. Tujuan IKD adalah dan mempercepat dan mempermudah transaksi digital antara publik dan privat.

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat bahwa selama pendampingan layanan aktivasi IKD terdapat beberapa permasalahan yang masih kurang maksimal dari pemerintah mengenai pentingnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sehingga masih banyaknya masyarakat tidak paham dengan beberapa inovasi pemerintah serta belum mampu memanfaatkan inovasi pelayanan yang ada.

Hal ini kita mendampingi masyarakat untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar mengetahui tata cara aktivasi dan penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan bahwa pendampingan aktivasi IKD akan membantu warga dalam melakukan administrasi kependudukan dan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan.

Pada saat pendampingan layanan aktivasi IKD dilakukan tanggal 26 Februari – 26 Maret 2024 pukul 08.00 – 15.00 WIB untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengurus melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Proses aktivasi IKD di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo meliputi :

1. Pemohon datang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dengan membawa smartphone dan sudah mendownload aplikasi IKD
2. Pemohon dapat menyetujui dan mendaftar akun
3. Pemohon dapat mengisi NIK, nomor telepon, serta email yang ada di smartphone tersebut
4. Setelah mengisi beberapa persyaratan data, pemohon dimohon untuk melakukan aktivasi atau verifikasi wajah
5. Setelah proses diatas sudah selesai, scan barcode dilakukan oleh pegawai kecamatan yang akan di scan di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD)
6. Setelah berhasil memindai barcode, pemohon di arahkan untuk membuka email yang telah dicantumkan di data diri, dan terdapat sebuah pin untuk aktivasi
7. Setelah aktivasi berhasil, pemohon membuka aplikasi IKD untuk aktivasi pin yang ada di email
8. Setelah proses pendaftaran IKD berhasil. Pemohon dapat melihat KTP maupun KK di aplikasi IKD. Serta pada saat ingin membuka harus memasukan pin.

Dan selama pendampingan aktivasi IKD adabeberapafaktor penghambat seperti : untuk usia yang sudah rentan akan susah melakukan aktivasi IKD jika tidak dibantu oleh petugas setempat serta tidak mau ribet, karena orang tua yang sudah rentan belum sepenuhnya mengerti mengenai teknologi era digital dan hanya tahu pengguna WhatsApp saja. Selain itu terkadang terkendala jaringan, untuk para pemohon aktivasi IKD terkendala email (salah menulis email, penyimpanan email penuh) sehingga tidak masuk notifikasi pemberitahuan di Gmail.

Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo, ada lebih dari seratus orang yang meminta cetak ulang KTP mereka karena hilang atau rusak, dan mereka harus memenuhi persyaratan untuk melakukan aktivasi IKD. Meskipun banyak orang yang mengajukan permohonan atau tahu tentang keberadaan IKD, tetapi perlu dievaluasi apakah mereka yang telah memilikinya benar-benar memahami manfaat dari penggunaan IKD atau hanya mengikuti kegiatan di IKD.



Gambar 1. pendampingan aktivasi dan reisterasi ke sistem IKD



Gambar 2. membantu petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo ke para pemohon aktivasi IKD



Gambar 3. Tim pemberdayaan maasiswa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo

SIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pendampingan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menerapkan tata kelola pemerintah yang baik untuk mendorong inovasi layanan. Dalam beberapa masyarakat, IKD telah diaktifkan dan digunakan untuk layanan publik lainnya. Ketika Identitas Kependudukan Digital (IKD) ada, pengguna akan lebih mudah mendapatkan layanan baik publik maupun privat. Banyak orang belum memahami fungsi dan pentingnya ID Kependudukan Digital (IKD) karena ada. Mereka juga percaya bahwa ID Kependudukan Digital (IKD) dapat disalahgunakan dalam kasus pencurian data. Selain itu, sejumlah besar individu belum berhasil menginstal aplikasi ID Kependudukan Digital (IKD) di ponsel mereka karena beberapa alasan. Meskipun banyak komunitas terus mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) membutuhkan internet, meskipun Indonesia belum terisolir sepenuhnya, dan banyak masyarakat masih menggunakan sinyal Wi-Fi saja.

SARAN

Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik, penulis memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat antara lain :

1. Bagi masyarakat, perlu diadakannya sosialisasi terbuka secara langsung mengenai pentingnya memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemahaman mengenai IKD perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya melihat IKD sebagai formalitas semata, akan tetapi juga sebagai alat yang dapat mempermudah dan membantu akses ke layanan lainnya saat membutuhkan dokumen kependudukan .

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mengupgrade sistem Digital (IKD)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Allah SWT dan Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yaitu Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H,
2. Ibu Dekan beserta jajarannya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Bagus Ananda Kurniawan S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing pengabdian kepada masyarakat
4. Bapak Taufik Hartanto, S.H selaku Pembina di Tempa pengabdian kepada masyarakat
5. Ibu Kanti Rahayu yang telah membantu kami di tempat pengabdian kepada masyarakat
6. Bapak M. Dedik Arifin, S.Kom selaku Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo
7. Bapak Allawy Syihafuddin, S.S selaku Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo
Bapak M. Bayu Permadi, S.Pd selaku Pegawai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Choerunnisa, R. R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. 8(6), 429–438. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Hamidah, U. (2012). Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertahanan. *Jurnal Ilmu Hukum* ,
- Kurniasih, L. W., & Widowati, N. (2016). Pelayanan Publik Dalam Menciptakan Pelayanan Prima Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy And Management Review*.
- L. Rahmadhanti and G. M. Iman, “Proseding Pengabdian Kepada Masyarakat Public Internship Symposium ; Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya PENDAMPINGAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (I,” pp. 152–158, 1945.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Source* (Edition 3). SAGE.
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis faktor-faktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat Kebon AgungSamarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 149–159.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). 46.739 WARGA SURABAYA TELAH AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/73913/46739-warga-surabaya-telahaktivasi-identitas-kependudukan-digital>
- S. A. Zafira and D. Hertati, “PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS,” *Dedik. J. Pengabdi. Kpd. ...*, vol. 3, no. 2, pp. 144–152, Jul. 2023, doi: 10.46368/DPKM.V3I2.1179.
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.